

Perempuan sebagai Pemeran Sentral Kedaulatan Pangan di Sekitar Hutan Lindung

Christine Wulandari^{*)} dan Pitojo Budiono^{**)}

^{*)}Program Studi Magister Ilmu Kehutanan, Universitas Lampung

^{**)}Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah,
Universitas Lampung

Jl. S Brojonegoro 1, Bandar Lampung 35145

Telp. 08128209075 Fax. 0721-704946

Email: christine.wulandari@fp.unila.ac.id dan chs.wulandari@gmail.com

Abstrak

Kedaulatan pangan suatu wilayah hutan tidak akan tercapai jika ketahanan pangannya belum terwujud, terutama di sekitar hutan lindung karena masyarakat hanya diizinkan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu. Di lapangan, hutan-hutan lindung secara umum dikelola dengan teknik agroforestry. Berdasarkan hasil penelitian di Lampung Barat diketahui bahwa perempuan mempunyai peran nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan di sekitar hutan lindung. Dalam mengaplikasikan agroforestry, perempuan mempunyai peran dalam berbagai kegiatan di pekarangan sekitar rumah dan wilayah hutan kelola. Metode penelitian menggunakan Regresi Logit untuk mendukung capaian tujuan penelitian yaitu mengetahui kegiatan-kegiatan perempuan yang secara nyata mendukung kedaulatan pangan di sekitar hutan lindung. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan persiapan bibit, weeding, pemeliharaan tanaman, pengolahan hasil dan pemasarannya merupakan kegiatan yang berpengaruh secara nyata. Dengan adanya apresiasi terhadap peran perempuan dalam pengelolaan hutan di wilayah penelitian maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi adanya kedaulatan pangan di wilayah tersebut.

Kata kunci: agroforestry, kedaulatan pangan, ketahanan pangan, perempuan, hutan

PENDAHULUAN

Definisi dari Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk menentukan kebijakannya sendiri dengan memprioritaskan produk pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, dan melarang adanya praktik perdagangan pangan dengan cara

dumping (Swastika, 2011). Konsep ini pada tahun 1996 pernah dideklarasikan oleh organisasi buruh tani dan petani kecil dunia La Via Campesina.

Berdasarkan paradigma ini maka setiap negara mempunyai hak untuk menentukan juga mengendalikan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dalam negaranya atau wilayahnya sendiri. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya local mereka, dan diharapkan tidak ada campur tangan dari negara lain. Konsep dan strategi kedaulatan pangan ini sudah diterapkan oleh beberapa negara, seperti Kuba, Mali, Mozambik, Venezuela, dan Bolivia. Kuba adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan kedaulatan pangan. Untuk menerapkan kedaulatan pangan, Kuba melakukan reformasi kebijakan pertanian yang mencakup tiga bidang, yaitu kebijakan teknologi, produksi, dan distribusi (Swastika, 2011). Indonesia mempunyai keragaman sumberdaya alam hayati dan pangan local yang cukup tinggi dan teknologi pertaniannya juga sudah maju sehingga bisa menjadi modal untuk bisa mencapai adanya kedaulatan pangan. Di tingkat lapang, implementasi ketiga kebijakan tersebut tentu saja harus ditopang oleh masyarakat yang langsung mengelola lahan pangannya, baik yang berasal dari sekitar rumah, kebun ataupun hutan. Selama ini hutan juga dikenal fungsinya sebagai salah satu sumber ketahanan pangan di suatu wilayah terutama karena dikelola dengan teknik agroforestry.

Khusus untuk pengelolaan hutan, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan mengarah pada implementasi UU No. 41 Tahun 1999 harus mengikutsertakan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan untuk turut serta menjaga kelestarian sumber daya hutannya (Pahlawanti dan Saroso, 2009; Wulandari, 2015). Adanya niat baik pemerintah telah diwujudkan dengan dilaksanakannya Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung melalui Permenhut No. P. 13/Menhut-II/2010 Tentang Hutan Kemasyarakatan yang kemudian berulang kali direvisi dan yang terakhir adalah PermenLHK No. P. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Menurut salah satu unit kementerian yang relevan dengan program HKM, dalam pelaksanaan HKM didukung Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender. Dengan demikian baik laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan dengan skema HKM mulai dari segi pengambilan keputusan. Kondisi ini diharapkan juga terjadi pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tribudi Syukur dan Tribudi Makmur sebagai desa yang telah dikenal di tingkat nasional dibuktikan pada

tahun 2013 kelompoknya telah menjadi juara I untuk pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat. Kelompok wanita HKm di wilayah ini juga sudah sangat dikenal sebagai kelompok yang mampu mengelola kelembagaannya secara baik seiring dengan kelompok HKm yang mayoritas dikelola oleh suami atau kaum laki-laki. Kemampuan KWT ini telah terbukti dengan berbagai gelar juara yang didapat dan juga memiliki kekayaan kelompok yang melebihi 1 milyar rupiah. Potensi yang dimiliki kelompok wanita inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini sekaligus menjadi tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peran para kaum ibu dalam mendukung ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan di wilayah mereka tinggal khususnya, di Lampung Barat pada umumnya.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 di Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berlokasi di Desa Tribudi Syukur dan Tribudi Makmur, Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan HKm di lokasi ini merupakan suatu skema pemberdayaan masyarakat yang terletak pada Register 45b Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/1454/KPTS/III. 05/2007 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Pengelolaan HKm di desa Tribudi Syukur dan Tribudi Makmur merupakan model HKm yang telah berkembang dalam skala nasional dan menjadi HKm percontohan. Pernyataan tersebut dipertegas menurut Pahlawanti dan Saroso (2009), yang menyatakan bahwa model HKm yang diterapkan di Desa Tribudi Syukur dan Tribudi Makmur merupakan salah satu proyek percontohan dalam berbagai aspek, baik dari segi pengelolaannya maupun pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali peran wanita didalamnya.

Jumlah responden diambil berdasar rumus Slovin (Arikunto, 2011), dan diperoleh sebanyak 48 responden yang datanya dianalisis dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan regresi logit binomial, dengan variable tergantungnya $Y =$ keberlanjutan ketahanan pangan di wilayah hutan lindung Register 45b. Semua variabel yang diuji adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh para ibu di lokasi penelitian.

Rumus model logit yang digunakan:

$$\Pr (PS = j) = \frac{1}{[1 + \exp(-A_j - X_i B)]}$$

$$\text{Ln} \frac{\Pr (PS = j)}{[1 - \Pr (PS = j)]} = A_j + X_i B_{ij}$$

dimana: $j = 0 \text{ or } 1$

$\Pr (PS = j) =$ probabilitas keberlanjutan ketahanan pangan

HASIL

Analisis data menggunakan kode 0 = ketahanan pangan tidak berkelanjutan dan 1 = ketahanan pangan berkelanjutan. Adapun variabel yang dianalisis dengan binomial logit adalah budidaya yang meliputi persiapan bibit (=bi), persemaian (=se), penanaman (=ta), weeding (=wee), pemupukan (=pu), pemeliharaan tanaman (=li), dikuti dengan variabel pengolahan hasil (=lah), dan pemasaran (=sar). Adanya pengelolaan hutan secara agroforestry maka anggota HKM juga mengelola kegiatan produksi yang lain, meliputi peternakan (=ter) dan perikanan (=kan) yang kemudian juga dimasukkan sebagai variabel yang kemudian dianalisis secara binomial logit. Selain itu, variabel social ekonomi juga disertakan dalam analisis yaitu jumlah anggota keluarga (=kel), pendidikan (=dik), pekerjaan (=pek), luas lahan (=lu), dan pendapatan (=pat). Semua kegiatan dan variabel yang diuji dalam penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan di 2 desa penelitian. Dari 48 responden yang dipakai sebagai sampel, diketahui bahwa 40 sampel masuk sebagai sampai yang terprediksi dengan benar.

Tabel 1. Hasil analisis binomial logit

Explanatory Variables	Coefficient	Std. Error	t-ratio
Constant	-0.38363	0.2419	-1.428
bi*	0.26363E-03	0.3339E-03	6.920
se	0.72142E-02	0.2948E-02	2.186
ta	-0.18368E-01	0.7384E-01	-0.253
wee*	0.18957E-01	0.7003E-01	8.367
pu	-0.12436E-01	0.7678E-01	-0.174

li*	0.50219E-01	0.7459E-01	0.557
lah*	-0.51987E-01	0.8065E-01	-0.701
sar*	-0.22143E-01	0.7507E-01	-1.980
ter	0.30081E-01	0.8453E-01	-0.304
kan	0.40155E-01	0.7810E-01	9.430
kel	0.28308E-01	0.1020E-01	0.368
dik	-0.47855E-02	0.2444E-01	1.367
pek	-0.70843E-02	0.3390E-01	-0.207
lu	-0.32762E-05	0.6984E-03	-0.105
pat	0.18620E-05	0.2019E-03	-0.236

*t-test showed coefficient was significantly different from the observed (t-test (3,0.2) = 1.638)

Log-likelihood	-139.00247
Chi-square	140.3958
Significance level	0.3400919E-08

PEMBAHASAN

Kaum wanita dan laki-laki di Desa Tribudi Syukur dan Desa Tribudi Makmur memanfaatkan hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Selain hasil hutan bukan kayu, sumber pendapatan juga berasal dari sawah, berdagang dan kegiatan ekonomi lainnya. Penelitian mengenai peran perempuan dalam ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di hutan lindung perlu dilakukan, mengingat HKM merupakan sumber penghasilan yang utama bagi petani di Desa Tribudi Syukur dan Desa Tribudi Makmur meskipun status hutannya adalah hutan lindung.

Intensifikasi merupakan usaha meningkatkan pendayagunaan lahan pertanian yang sudah ada. Pada awalnya intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani yang kemudian berkembang menjadi Sapta Usaha Tani. Sapta usaha tani adalah paket yang terdiri dari 7 jenis kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya : 1. Penggunaan bibit unggul 2. Pengolahan tanah yang baik 3. Pengaturan air irigasi yang baik 4. Pemakaian pupuk 5. Pemberantasan hama dan penyakit 6. Penanganan panen dan pasca panen 7. Pemasaran hasil panen (Sukisti, 2010). Intensifikasi pertanian dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian dan sekaligus berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat (Hartono *et al.*, 2010).

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia berdasarkan keharusannya memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk. Ketahanan pangan adalah aspek utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan sudah jadi perhatian di lingkup nasional dan internasional. Kerentanan pangan bisa mengakibatkan kualitas hidup masyarakat yang rendah, baik pada aspek fisik kesehatan, sosial maupun ekonomi (Purwaningsih, 2008).

Dalam penelitian ini, persiapan bibit menjadi variabel berbedanyata dalam ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Campo *et al.* (2007) yang dari hasil penelitiannya mengemukakan tentang adanya korelasi antara tapak dengan kualitas pohon yang tumbuh termasuk benih yang dihasilkannya. Benih yang baik tentu akan dihasilkan oleh suatu lokasi yang tinggi tingkat kesuburannya. Untuk weeding dan pemeliharaan tanaman sebagai dua kegiatan yang terkait dengan intensifikasi pertanian, menurut Hartono *et al.* (2010) adalah dua variabel yang berpengaruh terhadap pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Menurut Bart-Plane dan Taiwo (2016), pengolahan hasil dari suatu lahan adalah variabel penting dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan. Tantangan ke depan yang harus dijawab oleh para ahli teknik pertanian adalah menciptakan design mesin yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya dan dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding mesin yang telah ada. Khusus untuk pemasaran, menurut Belete *et al.* (2014) pemasaran adalah variabel penting dalam pengelolaan suatu lahan pertanian. Selama ini banyak orang berkonsentrasi hanya pada strategi peningkatan produktifitasnya saja. Menurutnya, pemasaran ini dipengaruhi gender, akses ke fasilitas kredit, status pernikahan, informasi pasar dan infrastruktur. Artinya, perempuan mempunyai peran penting dalam pemasaran.

“kedaulatan pangan secara sederhana diartikan sebagai menjamin tanah, air, bibit dan sumberdaya alam dikontrol oleh petani-petani kecil dan menengah; di mana hal ini terkait langsung dengan demokrasi dan keadilan” (Bernstein dan Bachriadi, 2014). Kondisi ini dapat ditemui di lokasi penelitian. Beberapa prinsip dari kedaulatan pangan (Bernstein dan Bachriadi, 2014), adalah: (1) pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar; (2) pangan adalah sumber nutrisi dan hanya

untuk tujuan berikutnya menjadi barang perdagangan; (3) perempuan memainkan peran sentral dalam kedaulatan pangan; (4) setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan sebenarnya terkait dengan pangan serta terlibat dalam proses pembentukan kebijakan pangan dan pertanian yang demokratis; (5) menjauhkan kegiatan produksi pertanian dari kecenderungan hanya untuk ekspor; (6) setiap petani memiliki hak untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan yang diawali dengan adanya jaminan tenurial, ketersediaan tanah yang baik, dan pengurangan bahan kimia; (7) kontrol yang demokratis atas sistem pangan adalah hal yang esensial; (8) perdamaian adalah pra kondisi yang diperlukan untuk kedaulatan pangan; (9) pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian yang seharusnya menjadi sektor utama (La Via Campesina 1996: 22). Di lokasi penelitian diketahui ada apresiasi peran perempuan dalam pengelolaan hutan maka berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa ada kedaulatan pangan di wilayah Tri Budi Syukur dan Tri Budi Makmur.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas data yang terkumpul dari 48 responden perempuan diketahui bahwa variabel-variabel yang berbedanya berpengaruh terhadap keberlanjutan ketahanan pangan adalah persiapan bibit, weeding, pemeliharaan tanaman, pengolahan hasil dan pemasaran. Variabel tersebut adalah sebagian dari kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam mengelola lahan hutan HKm yang ada dalam kewenangan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Revisi Edisi 2010*. Jakarta: PT Rineka.
- Bart-plane, A. dan Taiwo, A. 2016. Factors responsible for Post-harvest losses and their effects on rice producing farmers: a case study of afe and aveyime rice projects in the Volta Region of Ghana. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 04(03): 1015-1022.
- Bernstein H dan Bachriadi D. 2014. *Tantangan dalam Kedaulatan Pangan*. Arc Books. Bina Desa.

Belete, A., dan Hlongwane, J.J. 2014. Analyzing the factors Affecting the Market Participation of maize Farmers: a case Study of Small-scale Farmrs in Greater Giyani Local Municipality of the Mopani District, Limpopo Province. *African Journal of Agricultural Research*. 9 (10): 895-899.

Campo, A.D., Cerrillo RMN, Hermoso J. and Ibáñez AJ. 2007. Relationships between site and stock quality in *Pinus halepensis* Mill. reforestation on semiarid landscapes in eastern Spain. *Ann. For. Sci.* 64 (7): 719-731.

Hartono, Slamet, Dwidjono H. Darwanto, Nur Khoiriyah Agustin. 2010. Intensifikasi Usahatani Padi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T)*, (Online), (<http://litbang.pertanian.go.id>, diakses 17 Juni 2017).

Pahlawanti, R dan Saroso H.N. 2009. Hutan Kemasyarakatan: melestarikan hutan untuk kesejahteraan rakyat—catatan 10 tahun program HKM di Provinsi Lampung. *Bandarlampung: Watala dan Partnership For Governance Reform in Indonesia (PGR Indonesia)*.

Purwaningsih, Yunastiti. 2008. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Online), Jilid 9, No.1, (<http://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diakses 17 Juni 217)

Sukisti. 2010. Usahatani Padi dengan Sistem Tanam Pindah (Tapin) dan Sistem Tabur Benih Langsung (Tabela) Di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Disertasi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Yogyakarta.

Swastika, D.K.S. 2011. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. *Jurnal Inovasi Pertanian* 4(2): 103-117

Wulandari C., 2015. Prediction of Agroforestry Sustainability of *Hutan Marga* (Customary Forest) in Lampung Province, Sumatra, Indonesia. *SEAMEO-SEARCA*. Philippines